BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV dalam agenda pemilihan ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lamongan yang baru yang diselenggarakan di Gedung Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamongan. Dalam pemilihan tersebut terdapat 17 nama calon yang direkomendasikan oleh DPD PAN Lamongan diantaranya yaitu:

Berita acara hasil pendaftaran calon formatur DPD PAN Kabupaten Lamongan tahun 2016[1].

No.	Nama Calon	Alamat
1.	Husnul Aqib, Drs, MM.	Solokuro
2.	Sonhadji Zainudin, SE, MM.	Lamongan
3.	Moh. Thohir Malik, SH.	Karangbinangun
4.	Noroqib	Lamongan
5.	Yatno	Deket
6.	Imron,S.Pd.I	Maduran
7.	Suparnadi	Sugio
8.	Masyhudan, S.Pd	Pucuk
9.	Muhammad Saiku, S.Ag	Deket

[1] Dokumen DPD PAN Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10.	Heru Purnama, M.Pd	Brondong
11.	Amar Saifudin, Drs, MM	Lamongan
12.	Nurul Kholiq, ST	Sukodadi
13.	Amari	Sarirejo
14.	Fitriyadi	Sambeng
15.	H.Wiji, SE	Ngimbang
16.	Darwoto	Modo
17.	Irfanuddin	Solokuro

Dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2016 berakhir ricuh dan akibatnya musyawarah daerah berakhir deadlock tanpa menghasilkan keputusan apapun. Kericuhan Musyawarah Daerah disebabkan karena adanya perselisihan paham tentang mekanisme pemilihan ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan antara peserta musda dengan pimpinan sidang. Para peserta musda menginginkan agar diberikan hak suara untuk memilih ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan selain itu juga agar peserta musda di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) PAN se-Lamongan diberikan hak suara untuk memilih ketua DPD PAN Lamongan yang baru, selain itu peserta musda menolak anggota formatur yang direkomendasikan oleh DPW PAN Jatim.

Pasca *deadlock*, musyawarah daerah dalam pemilihan ketua DPD PAN Lamongan semakin memanas, mencuatnya nama Amar Syaifuddin yang akan ditetapkan oleh DPW PAN Jatim menjadi ketua DPD PAN Lamongan periode 2016-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2021 mendapat penolakan dari 21 DPC PAN yang ada di Lamongan. Mereka menganggap keputusan DPW PAN Jatim tidak sesuai dengan AD/ART PAN. 21 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lamongan menolak keputusan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Timur yang terkait dengan kabar penetapan Amar Syaifuddin menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Lamongan. Keputusan penetapan mantan wakil bupati Lamongan periode 2010-2015 tersebut sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Lamongan dianggap sepihak, mereka menilai tidak sesuai dengan AD/ART PAN.

1. **Dinamika politik PAN dalam pemilihan ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan tahun 2016.**

   Dinamika politik lokal yang berkembang di Indonesia terdapat perubahan yang signifikan, di negara Indonesia ini memiliki berbagai macam suku, ras, agama, perbedaan pendapat, serta perbedaan ideologi yang membuat pro dan kontra dalam politik lokal yang berkembang. Seperti halnya dalam musyawarah daerah (Musda) DPD PAN Kabupaten Lamongan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2016 yang berakhir ricuh ketika memasuki sidang pleno keempat yang membahas tentang penentuan bakal calon formatur DPD PAN Kabupaten Lamongan. Adanya keinginan yang tersampaikan dan tidak tersampaikan dan ada yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemilik wewenang yang membuat musda ricuh saat itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para peserta musda menginginkan untuk dilakukan pemilihan, akan tetapi pimpinan sidang menghendaki untuk dipilih secara mufakat bukan secara demokrasi selain itu peserta musda menginginkan agar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) diberikan hak suara untuk memilih bakal calon formatur.

Dalam pemilihan ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan terdapat 17 nama bakal calon formatur yang nantinya akan dipilih oleh para peserta musda, dari 17 nama tersebut pimpinan sidang yang di ketuai oleh Bapak Basuki Babussalam hanya mengambil 4 nama yang akan ditetapkan sebagai formatur dari situlah kericuhan terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sonhadji bahwa:

> *"Dari 17 nama calon formatur yang di rekomendasikan oleh DPD PAN Kabupaten Lamongan dari yang mendaftar sebanyak 17 calon maunya dari DPW yang disetujui hanya 4 nama calon formatur. Kalau hanya 4 formatur dilakukan tanpa adanya pemilihan, jika lebih dari 4 maka dilakukan dengan cara pemilihan diaturannya seperti itu. Akan tetapi yang mendaftar sebagai calon formatur sebanyak 17 orang dan semuanya sesuai dengan prosedur pendaftaran. Supaya tidak melalui proses pemilihan maka rekomendasinya dibuat 4 orang saja nah dari situ kelihatan dan mulai terjadi kericuhan[2]".*

Dari 4 nama calon formatur tersebut salah satunya adalah nama Amar Syaifuddin, mencuatnya nama Amar Syaifuddin yang akan ditetapkan oleh DPW PAN Jawa Timur untuk menjadi ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan mendapatkan penolakan dari 21 DPC PAN Kabupaten Lamongan

[2] Hasil wawancara, Lamongan 02 Januari 2016. 11.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dianggap keputusan tersebut adalah keputusan sepihak dari DPW PAN Jawa Timur. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Zawawi:

> *"Pemilihan ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan ini seharusnya dilakukan dengan cara voting bukan dengan cara mufakat. Dalam peraturan partai juga sudah dijelaskan bahwasannya jika pendaftar lebih dari 4 nama itu bisa dilakukan pemilihan bukan dengan cara mufakat. Sehingga Lamongan memutuskan untuk membentuk Forum Penyelamat Partai (FPP) dan mengumpulkan semua DPC untuk menolak hasil musda yang menetapkan Amar Syaifuddin sebagai ketua[3]".*

Berdasarkan pernyataan Bapak Zawawi selaku pengamat partai PAN di Kabupaten Lamongan, dipertegas kembali oleh Bapak Sonhadji Zainuddin selaku sekretaris DPD PAN Kabupaten Lamongan:

> *"Awal pelaksanaan musda dibuka oleh Bapak Masfuk selaku ketua DPW PAN Jawa Timur. Dalam pelaksanaan musda dibacakan tata tertib, pengesahan peserta dan pada saat mau dibacakan SK DPW tentang nama-nama calon formatur disitulah mulai rame, peserta musda menginginkan semua 17 nama harus disetujui dan akhirnya tidak menemukan titik temu. Kemudian pimpinan sidang meninggalkan tempat dan dinyatakan deadlock. Kemudian versi masing-masing itu membuat aturan disatu pihak menggunakan aturan hasil rakernas yaitu apabila di dalam permusyawaratan tidak menemukan titik temu maka yang menunjuk ketua adalah DPP itu sudah jelas dijelaskan. Sedangkan versi lain menyatakan bahwasannya SK DPD dikeluarkan oleh DPW sedangkan dalam AD/ART menyatakan bahwa yang dimaksud dengan SK DPD dikeluarkan oleh DPW itu apabila permusyawaratan menghasilkan keputusan[4]."*

Seiring dengan berjalannya waktu dinamika politik ditubuh internal DPD PAN Kabupaten Lamongan terus menghangat. Pasalnya Dewan

[3] Hasil wawancara, Paciran 04 Oktober 2016, 09.15.
[4] Hasil wawancara, Lamongan 30 Desember 2016. 10.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pimpinan Pusat (DPP) PAN menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang isinya yaitu menunjuk Viva Yoga Mauladi sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Lamongan. Dalam SK DPP PAN bernomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/102/IX/2016 yang tertanggal pada 1 September 2016 yang ditandatangani oleh Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum, dan Eddy Soeparno sebagai Sekretaris Jendral, yang memutuskan dan menetapkan Viva Yoga Mauladi sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD PAN Lamongan, Husnul Aqib sebagai Wakil Ketua, Sonhadji Zainuddin sebagai sekretaris, dan M. Fadloli sebagai Bendahara.

> *"Dengan adanya SK dari DPP PAN tersebut maka, dinamika politik ditubuh internal DPD PAN Kabupaten Lamongan terus menghangat, sebab adanya SK tersebut maka SK DPW PAN Jawa Timur tidak berlaku. Saya tidak memberikan keputusan secara pribadi akan tetapi boleh dibaca dalam surat keputusan DPP PAN, ada klausal yang menyebutkan bahwa semua keputusan yang bertentangan dengan DPP dinyatakan tidak sah. Segala keputusan yang bertentangan dengan keputusan dari DPP tidak berlaku. DPW, DPD, DPC dan DPRT wajib mematuhi dan tunduk dengan keputusan DPP[5]".*

Dinamika politik yang terjadi di tubuh internal DPD PAN Kabupaten Lamongan terjadi pada saat mekanisme pemilihan ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan yang awalnya dilakukan melalui pemilihan akan tetapi dilakukan secara mufakat yang menyebabkan timbulnya konflik.

2. Faktor yang melatarbelakangi dinamika politik DPD PAN Kabupaten Lamongan tahun 2016.

[5] Hasil wawancara, Lamongan 31 Desember 2016. 09.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinamika politik lokal selalu menjadi kajian yang menarik untuk diikuti, seperti dinamika politik yang terjadi ditubuh internal DPD PAN Kabupaten Lamongan. Dimana, selalu ada faktor yang turut melatarbelakangi dinamika politik DPD PAN Kabupaten Lamongan. Sebuah perubahan yang terjadi pasti memiliki suatu faktor yang menyebabkan adanya perubahan yang mana perubahan tersebut mengarah kepada politik. Dalam hal ini terdapat faktor yang melatarbelakangi dinamika politik DPD PAN Kabupaten Lamongan yaitu faktor kepentingan dan faktor elit. Saat pemilihan ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan berlangsung terjadi kericuhan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam mekanisme pemilihan selain itu dari 17 nama calon yang mendaftar, DPW hanya mengambil 4 nama formatur yang menyebabkan timbulnya konflik itu terjadi. Perubahan merupakan hasil interaksi kepentingan, bahkan ditentukan oleh posisi sosial atau kondisi materil elit. Kepentingan politik ini identik dengan konflik politik. Artinya, realitas politik selalu diwarnai oleh dua kelompok yang mempunyai kepentingan masing-masing sehingga menyebabkan adanya benturan[6].

Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama yakni sama-sama berupaya untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, kesempatan dan kehormatan. Pada saat pemilihan ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan berlangsung yaitu saat memasuki sidang pleno ke empat yang

[6] Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama & konflik sosial* (Bandung: CV. Pustaka Sosial, 2015), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang pengesahan calon formatur, yang mendaftar menjadi calon ketua DPD PAN Lamongan sebanyak 17 nama calon formatur yang direkomendasikan oleh DPD PAN Kabupaten Lamongan akan tetapi DPW hanya menyetujui 4 nama calon formatur harapannya agar tidak melalui proses pemilihan. Jika hanya 4 nama formatur dilakukan tanpa adanya pemilihan dan jika lebih dari 4 nama formatur maka dilakukan dengan cara pemilihan dari situ penyebab kericuhan itu terjadi.

Perubahan politik terjadi secara terus menerus di dalam setiap masyarakat, hal ini berkaitan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal sebagai dampak dari sifat dan interaksi antar kelompok sosial yang ada dan pergantian aktor politik dan kepemimpinan. Dalam pemilihan ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan masing-masing calon mempunyai kepentingan sendiri-sendiri untuk meraih kekuasaan yang diinginkan.

B. Pembahasan

1. Dinamika politik PAN dalam pemilihan ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan tahun 2016.

Dinamika politik yang terjadi di tubuh internal DPD PAN Kabupaten Lamongan merupakan suatu hal yang terjadi secara signifikan karena adanya perubahan secara langsung yang menyebabkan timbulnya kericuhan pada saat pemilihan ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini dipengaruhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh adanya elite politik yang berkuasa yang menghendaki pemilihan dilakukan dengan cara mufakat bukan dengan cara pemilihan. Agar calon yang dikehendaki oleh DPW PAN Jawa Timur menjadi ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan periode 2016-2021. DPW PAN Jawa Timur menetapkan Amar Syaifuddin menjadi ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan, namun penetapan tersebut mendapatkan penolakan dari 21 DPC PAN Kabupaten Lamongan. Karena para peserta musda menganggap bahwa keputusan penetapan Amar Syaifuddin menjadi ketua adalah keputusan sepihak dari DPW PAN Jawa Timur bukan dari keputusan bersama.

Konflik tidak bisa muncul begitu saja ada faktor yang turut berperan dalam timbulnya konflik tersebut. Konflik merupakan suatu bentuk pertentangan, ketidaksepakatan, ketidakcocokan antara dua orang atau lebih, antara kelompok orang yang ditandai oleh kekerasan fisik dan konflik itu sendiri merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan[7]. Adanya perubahan dalam mekanisme pemilihan ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan yang pada periode sebelumnya dipilih melalui pemilihan dan pada periode selanjutnya yaitu pada periode 2016-2021 dipilih secara mufakat. Perubahan sosial yang terjadi secara mendadak biasanya akan menimbulkan kerawanan konflik, konflik dipicu karena adanya keadaan yang berubah-ubah yang terlalu mendadak biasanya diwarnai dengan gejala di mana tatanan

[7] Dean G. Pruitt, *Teori Konflik Sosial (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011)*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku lama sudah tidak digunakan lagi sebagai pedoman. Selain itu perubahan yang terlalu mendadak akan memunculkan kelompok yang saling bertentangan. Oleh sebab itu diperlukan adanya manajemen organisasi, tujuan utama manajemen adalah untuk membangun dan mempertahankan kerjasama yang kooperatif[8]. Seiring dengan berjalannya waktu dinamika politik ditubuh internal DPD PAN Kabupaten Lamongan terus berjalan dengan baik, pasalnya DPP sudah menerbitkan SK DPD PAN bernomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/102/IX/2016 yang tertanggal pada 1 September 2016.

Keputusan yang dibuat oleh DPP PAN tidak bisa diganggu gugat pasalnya sudah dijelaskan di dalam ketetapan rapat kerja nasional Partai Amanat Nasional (PAN) nomor 02 Tahun 2015 tentang permusyawaratan tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting Partai Amanat Nasional yang tertera pada bab I yang membahas tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan tentang bagi DPW dan DPD yang masih terjadi permasalahan atau perselisihan organisasi dalam penetapan peserta atau dalam persiapan musyawarah, DPP berwenang menetapkan keputusan berdasarkan musyawarah dan pertimbangan khusus demi kepentingan partai. Keputusan DPP bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat[9]. Jika ditinjau dari fungsi partai politik sendiri adalah mencari dan mempertahankan

[8] Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian),* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 132.
[9] Ketetapan Rapat Kerja Nasional Ke-1 Partai Amanat Nasional, Hal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu[10].

2. **Faktor yang melatarbelakangi dinamika politik DPD PAN Kabupaten Lamongan tahun 2016.**

Faktor yang melatarbelakangi dinamika politik DPD PAN Kabupaten Lamongan disebabkan karena adanya faktor kepentingan dari masing-masing pihak untuk memperebutkan kekuasaan selain faktor kepentingan juga didukung dengan adanya faktor elit politik yang ikut berperan dalam dinamika politik DPD PAN Kabupaten Lamongan. Yang dimaksud dengan faktor kepentingan disini adalah sama-sama berupaya untuk memperebutkan kekuasaan, kekayaan, kesempatan dan kehormatan. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik itu dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan, dan sebaganya.

Sedangkan yang dimaksud dengan faktor elit yaitu pada Awal musyawarah daerah yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuka oleh Bapak Masfuk selaku ketua DPW PAN Jawa Timur berjalan dengan lancar namun saat memasuki sidang pleno ke empat membahas tentang calon formatur terjadi kericuhan disebabkan karena adanya perubahan mekanisme pemilihan selain itu dari 17 nama calon yang direkomendasikan

[10] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gransindo, 1992), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh DPD PAN Kabupaten Lamongan hanya diambil oleh DPW PAN Jawa Timur menjadi 4 calon formatur yang harapannya agar tidak melalui proses pemilihan dan agar calon yang dikehendaki oleh DPW menjadi ketua DPD PAN Kabupaten Lamongan periode 2016-2021 dari situlah kericuhan itu terjadi. Kepentingan politik ini identik dengan konflik politik. Artinya, realitas politik selalu diwarnai oleh dua kelompok yang mempunyai kepentingan masing-masing sehingga menyebabkan adanya benturan[11].

Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan[12], dimana kelompok semu merupakan kumpulan dari pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok-kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas, kelompok kepentingan ini mempunyai struktur organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. Disini yang termasuk kelompok semu adalah peserta musda yang tidak menginginkan pemilihan dilakukan secara mufakat. Sedangkan kelompok kepentingan yang sekaligus sebagai elit politik yang terlibat dalam dinamika politik DPD PAN Kabupaten Lamongan adalah DPW PAN Jawa

[11] Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama & konflik sosial* (Bandung: CV. Pustaka Sosial, 2015), 37.
[12] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada media Group, 2014), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur yang menghendaki pemilihan dilakukan secara mufakat selain itu yang dari 17 nama yang harus disahkan hanya dipilih 4 nama calon formatur yang harapannya agar calon yang dikehendaki terpilih dan berhasil dalam menduduki ketua di DPD PAN Kabupaten Lamongan. Didalam peraturan sudah dijelaskan bahwa jika calon formatur lebih dari 4 dilakukan dengan cara pemilihan dan jika formatur yang mendaftar hanya 4 calon maka dilakukan dengan cara mufakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id